

Tepisari Village Government Strategies in Increasing Community Participation in Development Programs

Strategi Pemerintah Desa Tepisari dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan

Putri Larasati Kiyato ^{1a(*)} Danang Purwanto ^{2b}, Atik Catur Budiati ^{3c}

¹²³Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

^a putrik4@student.uns.ac.id

^b mdpur@staff.uns.ac.id

^c atikcaturbudiati@staff.uns.ac.id

(*) Putri Larasati Kiyato

putrik4@student.uns.ac.id

How to Cite: Putri Larasati Kiyato. (2024). Strategi Pemerintah Desa Tepisari dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan doi: 10.36526/js.v3i2.3657

Received : 21-02-2023
 Revised : 26-03-2024
 Accepted : 03-04-2024

Keywords:

Community Participation,
 Development,
 Strategy,
 Village Government

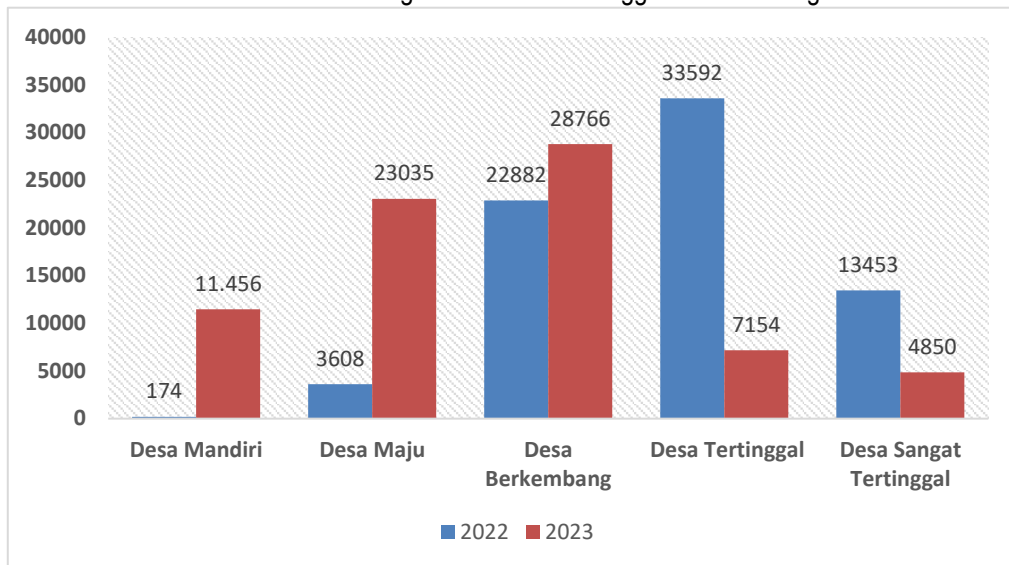
Abstract

As the development of villages becomes more complex, community participation is considered an important factor for the success of rural development programs. However, the lack of community participation is an obstacle in village development. A strategy from the village government is needed to increase community participation in development. This study aims to determine the Tepisari Village government's strategy in increasing community participation in development programs. The research method used in this research uses a qualitative approach with a case study in Tepisari Village. The data analysis technique in this research uses three stages data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research was analyzed using Geoff Mulgan's theory of government strategy. The results obtained from this study indicate that the Tepisari Village government's strategy in increasing community participation in village development programs has been running as planned. Some of the strategies used include openness, closeness between the village government and the community, improving human resources, and involving community aspirations in planning, implementing, and evaluating the village development process. However, there are several obstacles, namely related to the budget and the limited participation of people who work overseas.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung di lingkungan desa dengan adanya peran serta aktif masyarakat, dengan kegiatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan baik jasmani, material, mental, dan spiritual (Chotimah, et. al, 2019). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang desa menjelaskan pengertian pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pembangunan desa yaitu untuk mengatasi kemiskinan penduduk dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar mereka melalui pembangunan infrastruktur, optimalisasi sumber daya alam, peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal sesuai dengan kemampuan desa, masyarakat, dan proses pembangunan yang berkelanjutan (Rahman, 2016). Hal ini dapat diartikan, yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah upaya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat guna menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Tabel 1. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



Sumber: Diolah dari Kemendes PDTT, 2023

Berdasarkan table diatas, data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada tahun 2023 terdapat desa mandiri yang meningkat dari 174 menjadi 11.456, desa maju meningkat dari 3.608 menjadi 23.035, desa berkembang meningkat dari 22.882 menjadi 28.766, sedangkan desa tertinggal berkurang dari 33.592 menjadi 7.154 desa. Dan desa sangat tertinggal dari 13.453, kini hanya ada 4.850 desa. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah desa maju dan desa maju semakin meningkat dan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal semakin berkurang. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa (Kusumastuti, 2018).

Seiring dengan semakin kompleksnya pembangunan desa, partisipasi masyarakat dianggap sebagai faktor penting bagi keberhasilan program pembangunan pedesaan (Jayanti, 2023). Partisipasi masyarakat menjadi penting pada semua tahapan pembangunan desa karena masyarakat dapat menyampaikan pengetahuan, kebutuhan, dan aspirasi yang dapat membantu mengarahkan proses pembangunan ke arah yang lebih efisien dan berkelanjutan (Turmudi & Mursid, 2020). Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa diharapkan dapat menciptakan rasa memiliki, pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan desa dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (Kamuli, et. al, 2023).

Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari wilayah provinsi Jawa Tengah yang sebagian besar wilayahnya adalah desa. Desa perlu mempercepat pembangunannya, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus meningkat (Amalia & Syawie, 2015). Percepatan pembangunan juga penting dalam mengatasi tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan perubahan demografi (Manshur, 2017). Oleh karena itu, pembangunan desa diperlukan untuk memenuhi potensi dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Kamuli, et. al, 2023).

Penelitian yang dilakukan Hadawiya, et. al (2021) tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah karena berbagai alasan termasuk ketidakamanan. Komunitas yang memiliki dewan desa dalam proses pengambilan keputusannya. Yazid, et. al (2019) yang meneliti partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia di desa Sukahurip, wilayah Pamaricán, kabupaten Ciamis, menemukan bahwa partisipasi

masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia masih kurang, karena masyarakat belum mengetahui pentingnya pembangunan desa dan kurangnya pemahaman masyarakat akan perencanaan desa. Hal ini dapat disimpulkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa masih rendah (Malik, 2020). Namun, kebanyakan penelitian hanya berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji strategi pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Peningkatan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi masyarakat aktif dalam semua tahapan pembangunan desa tidak lepas dari kecakapan pemerintah desa, khususnya kepala desa (Simbolon, 2021). Hal ini karena kepala desa merupakan kepala pemerintahan pada tingkat desa yang menjadi peran utama dalam mengkoordinasi, memfasilitasi, dan mendorong partisipasi masyarakat (Simbolon, 2021). Pemerintah desa perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga proses pembangunan desa lebih menyeluruh, berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal (Kurniawan, et. al, 2023). Penelitian ini akan mengkaji tentang strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan desa di Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan analisis teori strategi pemerintah menurut Geoff Mulgan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa setempat mengenai strategi pengelolaan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui lebih dalam terkait strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang dianalisis berdasar teori strategi pemerintah menurut Geoff Mulgan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda (Sugiyono, 2013). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel dimana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu (Sugiyono, 2013). Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tepisari.

Teknik analisis data menggunakan tiga tahapan. Pertama, reduksi data yaitu proses penyederhanaan, pemilihan dan pemfokusan pada informasi yang paling penting dan sesuai dari data yang dikumpulkan. Kedua, penyajian data berarti mengorganisasikan dan menyajikan data sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau peneliti lain. Ketiga, menarik kesimpulan adalah tahap terakhir dari proses penelitian kualitatif, di mana peneliti mengembangkan interpretasi atau pemahaman atas temuannya (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Desa Tepisari termasuk dalam wilayah kabupaten Sukoharjo, provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Desa Tepisari terbagi menjadi sebelas dukuh yaitu Bener, Gadingmulyo; Karangale, Karangwinangun, Ngluwar, Ngrunggo, Pondokrejo, Sambirejo, Sidorejo, Manisharjo, dan Tepisari. Sebelas dukuh tersebut kemudian dibagi menjadi empat perdukungan atau kebayanan,

dimana satu perkuduhan memiliki kepala dukuh masing-masing. Jumlah penduduk yaitu 3020 jiwa terdiri dari 1529 laki-laki dan 1491 perempuan, rata-rata usia masyarakat Desa Tepisari yaitu 40-50 tahun. Masyarakat Desa Tepisari rata-rata lulusan SMP dan SMA. Mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah buruh tani dan petani, sebagian kecil juga adalah pedagang dan buruh di kota lain atau perantauan serta jasa di berbagai sektor.

Tujuan pemerintah Desa Tepisari yaitu menjadikan desa tepisari lebih maju, mampu, dan makmur serta kepuasan masyarakat adalah yang utama. Kemudian, tujuan tersebut digambarkan dalam slogan desa dengan menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa daerah ialah "*Nyawiji Mbangun Tepisari*" yang artinya Bersatu membangun tepisari. Untuk mewujudkan slogan tersebut, dalam membangun desa diperlukan partisipasi aktif masyarakat. Karena partisipasi masyarakat menjadi factor penting dalam Pembangunan desa. Dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi masyarakat perlu diperlukan adanya strategi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Strategi yang dilakukan pemerintah Desa Tepisari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan desa sebagai berikut (berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun 1 dan Kepala Dusun 3 Desa Tepisari).

Tabel 2. Strategi dan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa

STRATEGI	KEGIATAN
Keterbukaan	1. Memasang infografis terkait penggunaan anggaran desa.
Komunikasi	1. Komunikasi dilakukan secara berjenjang melalui pemerintah desa, kepala dusun, RW dan RT. 2. Memanfaatkan media sosial desa sebagai sarana komunikasi seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook. 3. Menggunakan fasilitas desa seperti mikrofon masjid. 4. Menggunakan infografis yang dipasang di setiap dusun.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Mengadakan bimbingan teknis, pelatihan, dan sosialisasi. Seperti : a.) Bimbingan teknis peningkatan kapasitas perangkat desa b.) Bimbingan teknis relawan pendataan SDGs c.) Sosialisai dan penyuluhan Kelompok Wanita Tani (KWT) d.) Sosialisasi Pemuktakhiran Data SDGs e.) Sosialisai dan pelatihan pengolahan bahan bekas menjadi barang yang memiliki nilai guna.
Kedekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat	1. Kepala desa ringan tangan turut serta terjun membantu masyarakat pada setiap kegiatan baik tingkat desa, dusun, RT dan RW. 2. Kepala dusun, RT dan RW memberi contoh dan ikut serta dengan terjun langsung pada setiap program yang diadakan. 3. Perangkat desa takziah pada setiap warga yang

	meninggal dunia.
<hr/>	
Melibatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan musyawarah di tingkat RT 2. Menyelenggarakan musyawarah di tingkat RW 3. Menyelenggarakan musyawarah di tingkat Dusun 4. Menyelenggarakan musyawarah Desa yang dihadiri perwakilan RT, RW, Kepala Dusun, BPD, PKK, Tokoh Masyarakat, dan Karang Taruna. Seperti : <ol style="list-style-type: none"> a) MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) b) MUSDES Pembahasan Rancangan APBDes c) MUSDES Penetapan SDGs d) MUSDESUS (Musyawarah Desa Khusus) dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat desa e) Rapat Koordinasi PEMDES Tepisari dan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa)

Kendala dalam partisipasi masyarakat di Desa Tepisari yaitu anggaran dan karena terdapat masyarakat yang menjadi perantauan di kota lain maka tidak dapat berpartisipasi aktif dalam usulan, kegiatan dan pengambilan keputusan. Masyarakat yang bekerja di perantauan mengikuti semua apa yang menjadi keputusan di Desa Tepisari. Partisipasi masyarakat perantauan biasanya berupa materil yaitu uang untuk membantu pelaksanaan pembangunan.

Pembahasan

Penelitian ini dikaji menggunakan teori strategi pemerintah menurut Geoff Mulgan. Geoff Mulgan menitikberatkan dalam strategi pemerintah pentingnya inovasi, keterlibatan masyarakat, keterbukaan, pertanggungjawaban dan pemberdayaan daerah sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan manfaat positif dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Kodrianingsih, et. al, 2023). Pendekatan Geoff Mulgan secara khusus berfokus pada strategi yang dikembangkan untuk organisasi politik, yaitu pemerintah. Guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, Geoff Mulgan mengemukakan lima indikator yaitu tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran (Mulgan, 2009).

Pertama, tujuan (*purpose*) merupakan hal yang menjadi landasan pemerintah untuk bertindak. Dalam tujuan terdapat dua sub indikator yaitu misi dan kemampuan menjalankan misi (Kodrianingsih, et. al, 2023). Misi adalah tujuan yang ingin dicapai dalam suatu program atau kegiatan. Sedangkan kemampuan menjalankan misi adalah cara pemerintah untuk mencapai tujuan. Tujuan Desa Tepisari tertuang dalam visi desa yaitu menjadikan desa tepisari lebih maju, mampu, dan makmur serta kepuasan masyarakat adalah yang utama. Melalui tujuan tersebut digambarkan sebuah slogan desa "Nyawiji Mbangun Tepisari" yang artinya bersatu membangun tepisari. Visi dan misi atau tujuan pemerintah desa ditetapkan sebagai acuan desa dalam melaksanakan roda pemerintahan selama 6 tahun. Kemampuan menjalankan misi di Desa Tepisari yaitu dengan menggunakan beberapa strategi seperti keterbukaan, kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan melibatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembangunan desa.

Kedua, lingkungan (*environment*) adalah pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan desa dengan mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki (Pebriana, 2021). Sub indikator dalam lingkungan ada dua yaitu kondisi alam dan manusia (Kodrianingsih, et. al, 2023). Pemerintah Desa Tepisari dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kondisi alam dan sumber daya manusianya. Potensi alam di Desa Tepisari adalah sawah karena sektor pertanian di desa tersebut cukup luas, maka pemerintah desa juga memfasilitasi agar masyarakat tetap bisa bertani di musim kemarau dibuatkan sumur dalam sebagai alat perairannya. Dalam mengambil suatu keputusan pemerintah Desa Tepisari juga mempertimbangkan kondisi sumber daya manusianya apabila Sumber Daya Manusia (SDM) kurang maka akan dilakukan suatu sosialisasi atau pelatihan terlebih dahulu. Seperti bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa, pelatihan untuk kader kesehatan desa dalam hal ini PKK, sosialisasi peningkatan kapasitas generasi muda yaitu karang taruna.

Ketiga, pengarahan (*direction*) adalah suatu upaya yang dilakukan antar anggota, baik pemerintah desa maupun warga masyarakat agar dapat tertanam tekad yang kuat untuk mencapai tujuan Bersama (Akbari, 2023). Terdapat empat sub indikator dalam pengarahan yaitu koordinasi, motivasi, komunikasi, dan perintah (Kodrianingsih, et. al, 2023). Koordinasi yang dilakukan pemerintah Desa Tepisari dilakukan secara berjenjang, ketika terdapat instruksi dari pemerintah pusat maupun daerah pemerintah desa mengumpulkan semua perangkat desa, kepala dusun, dan anggota BPD untuk menemukan kesepakatan terkait instruksi tersebut. Setelah disepakati, kemudian instruksi tersebut diumumkan kepada masyarakat melalui kepala dusun kemudian disampaikan kepada RT dan RW. Motivasi yaitu suatu pembangkit untuk masyarakat agar terlibat dalam kegiatan yang diadakan pemerintah dengan tujuan tertentu. Pemerintah Desa Tepisari memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa dengan menjalin kedekatan kepada masyarakat. Seperti, kepala desa ringan tangan turut serta terjun membantu masyarakat pada setiap kegiatan baik tingkat desa, dusun, RT dan RW. Perangkat desa takziah pada setiap warga yang meninggal dunia. Kepala dusun, RT dan RW memberi contoh dan ikut serta dengan terjun langsung pada setiap program yang diadakan.

Komunikasi yaitu suatu pertukaran informasi antar individu dalam kelompok untuk mencapai tindakan bersama. Proses komunikasi yang dilakukan di Desa Tepisari dapat secara langsung, memanfaatkan media sosial desa, menggunakan fasilitas desa seperti mikrofon masjid, dan menggunakan infografis. Infografis dibuat biasanya untuk penyaluran informasi terkait anggaran APBDes. Komunikasi dilakukan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pemerintah desa dengan masyarakat. Apabila terdapat miskomunikasi maka akan diinformasikan dan memberi pemahaman sedemikian rupa kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar tercipta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Sub indikator yang keempat, perintah adalah proses pemberian petunjuk oleh pemerintah dalam suatu program atau kegiatan. Tujuan dari perintah untuk memberikan arahan agar program berjalan efektif. Pemerintah Desa Tepisari dalam memberikan arahan terkait program atau kegiatan baru melalui kepala dusun.

Keempat, tindakan (*action*) merupakan strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam mencapai tujuan, dapat dengan membuat kebijakan, program atau kegiatan (Permatasari, et. Al. 2024). Pada tindakan terdapat tiga sub indikator yaitu situasi masyarakat, kegiatan yang digunakan, dan pengambilan keputusan (Kodrianingsih, et. al, 2023). Situasi masyarakat adalah pemerintah dalam membuat suatu program perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Tepisari buruh tani dan petani untuk menunjang pekerjaan tersebut di musim kemarau pemerintah desa membuat sumur dalam untuk perairan sawah. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tetap bisa bertani saat musim kemarau.

Kegiatan yang digunakan yaitu menentukan jenis kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Banyak strategi yang digunakan pemerintah Desa Tepisari untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam program pembangunan desa. Seperti, keterbukaan, menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat, menjalin kedekatan antara pemerintah desa

dengan masyarakat, melibatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program pembangunan desa. Pengambilan keputusan merupakan proses akhir dari perencanaan suatu program pemerintah yang akan ditetapkan. Pemerintah Desa Tepisari dalam pengambilan keputusan melibatkan masyarakat melalui beberapa musyawarah. Musyawarah desa bertujuan untuk menggali aspirasi masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, dusun, dan desa. Melibatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program pembangunan desa merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan. Aspirasi masyarakat dihimpun dari musyawarah pada setiap wilayah. Terdapat beberapa musyawarah di desa tepisari seperti, musyawarah di tingkat RT, musyawarah di tingkat RW, musyawarah di tingkat Dusun, musyawarah Desa yang dihadiri perwakilan RT, RW, Kepala Dusun, BPD, PKK, Tokoh Masyarakat, dan Karang Taruna. Musyawarah Desa dikelompokkan menjadi beberapa tergantung kebutuhan dan kepentingan.

Kelima, pembelajaran (*learning*) adalah proses memahami berhasil tiaknya suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Suhaedah, et. Al, 2023). Terdapat dua sub indikator dalam pembelajaran yaitu metode perbandingan dan identifikasi (Kodrianingsih, et. al, 2023). Metode perbandingan merupakan proses memahami keberhasilan program dengan kondisi sebelum program diterapkan, sebagai sarana perbaikan kebijakan di masa yang akan datang. Kegiatan perbandingan di Desa Tepisari dengan melibatkan masyarakat yang diselenggarakan pada saat musyawarah desa. Hal ini karena masyarakat sebagai pegawai atas keberjalanan suatu program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah desa. Selain menjadi pengawas masyarakat juga dapat menyumbangkan gagasan terkait pembangunan desa. Identifikasi yaitu mengkaji kesesuaian implementasi program dengan tujuannya dan evaluasi program. Proses identifikasi dilakukan oleh Pemerintah Desa Tepisari dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun terjun langsung melihat kondisi ke lapangan untuk melihat proses pembangunan berlangsung dan partisipasi aktif masyarakat. Evaluasi pada strategi pemerintah drsa tepisari dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada program pembangunan yaitu anggaran dan karena terdapat masyarakat yang menjadi perantauan di kota lain maka tidak dapat berpartisipasi aktif dalam usulan, kegiatan dan pengambilan keputusan. Masyarakat yang bekerja di perantauan mengikuti semua apa yang menjadi keputusan di Desa Tepisari. Partisipasi masyarakat perantauan biasanya berupa materil yaitu uang untuk membantu pelaksanaan pembangunan.

PENUTUP

Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat guna menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Semakin kompleksnya pembangunan desa, partisipasi masyarakat dianggap sebagai faktor penting bagi keberhasilan program pembangunan pedesaan. Namun, kurangnya partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam pembangunan desa. Diperlukan adanya suatu strategi dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keberjalanan strategi pemerintah Desa Tepisari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan desa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pemerintah Desa Tepisari menggunakan beberapa strategi seperti keterbukaan, kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan melibatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembangunan desa. Semua strategi ini dilakukan agar terciptanya rasa saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah desa. Sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah desa adalah kunci dalam keberhasilan pembangunan desa. Namun, strategi tersebut tidak lepas dari beberapa kendala yaitu terkait terbatasnya anggaran yang harus

disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan desa dan keterbatasan partisipasi masyarakat yang bekerja di perantaraan sehingga tidak dapat berpartisipasi aktif dalam usulan, kegiatan dan pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, M. S., Mustanir, A., & Jabbar, A. (2023). Strategi pemerintah desa berbasis pemberdayaan perempuan dalam peningkatan pendapatan masyarakat di umkm. *JDP (jurnal dinamika pemerintahan)*, 6(2), 180-196. <https://doi.org/10.36341/jdp.v6i2.3773>
- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu Kajian dalam perspektif sosiologi. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.146>
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 103-113. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192-200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Jayanti, N. W. D. B. (2023). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(2), 51-58. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58>.
- Kamuli, S., Wantu, S. M., Hamim, U., Djafar, L., Sahi, Y., & Dahiba, H. (2023). Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara. *Jambura Journal Civic Education*, 3(2). <https://doi.org/10.37905/jacedu.v3i2.21827>
- Kemendes, PDPT. (2023). Indeks Desa Membangun. (<https://idm.kemendes.go.id> , diakses : 5 Desember 2023)
- Kodrianingsih, W. L., Rispawati, R., & Alqadri, B. (2023). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Aikmel. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5384-5391. <https://doi.org/10.54371/jljp.v6i7.2459>
- Kurniawan, A., Wulan, T. R., & Muslihudin, M. (2023). Pengembangan Potensi Desa Wisata di Banyumas Menuju Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 8(5), 169-181. <https://doi.org/10.37149/jimdp.v8i5.334>
- Kusumastuti, N. (2018). Strategi mempercepat pembangunan desa mandiri: studi di Desa Kemadang Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(1), 177-198. <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-09>
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325-343. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for The Common Good*. Oxford University Press.
- Mashur, D. (2017). Strategi Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Metropolitan Madani. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4(2), 109-114. <https://www.academia.edu/download/81414043/4023.pdf>
- Pebriana, F., Mulyawan, R., & Sutrisno, B. (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(1), 11-22. <https://doi.org/10.24198/janitra.v1i1.33023>

- Permatasari, I., Mulyawan, R., & Taryana, A. (2024). STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI APLIKASI E-OFFICE (STUDI PADA KECAMATAN CICALENGKA TAHUN 2022). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 4(1), 114-121. <https://journal.unpad.ac.id/janitra/article/viewFile/52869/22048>
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(2), 189-199. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1788>
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302. <https://pdfs.semanticscholar.org/1488/bf097c4c84f03c05fa9d7eab4f9b8190f0fb.pdf>
- Sugiyono, P. Dr. (2013), *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhaedah, D. Y., Syamsudin, U., & Mazya, T. M. (2023). STRATEGI DAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN TANGERANG. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 110-125.
- Turmudi, H., & Mursid, M. (2020). Peran Perangkat Desa Dalam Optimalisasi Potensi Lokal di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. *Res Judicata*, 3(2), 129-151. <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v3i2.2308>
- Yazid, A. P., Yuliani, D., & Sundari, I. P. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia di desa sukahurip kecamatan pamarican kabupaten ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 251-261. <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i3.2707>